

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA **2021**

KOTA SALATIGA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2021

KOTA SALATIGA



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KOTA SALATIGA 2021

Katalog BPS: 4102002.3373

No. Publikasi: 33730. 2203

ISSN.: -

Ukuran buku: 14,8 cm x 21,0 cm

Jumlah Halaman: ix + 47 Halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Penanggung Jawab : Satriono, S.Si, M.M

Editor : Retno Mustikaningrum

Penulis : Santi Widyastuti

Penyusun : Santi Widyastuti

Gambar Kulit

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Ilustrasi: <https://www.canva.com/>

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga 2021** merupakan publikasi yang memuat penjelasan pembangunan manusia Kota Salatiga secara series tahun 2011-2021. Harapannya publikasi ini dapat dijadikan sebagai indikator, saran dan masukan untuk pembangunan Kota Salatiga.

Publikasi ini menyajikan angka IPM metode baru. Dalam penghitungan IPM metode baru telah dilakukan beberapa perubahan serta penyesuaian IPM baik indikator yang digunakan maupun teknik penghitungannya. Sehingga diharapkan angka IPM metode baru ini lebih valid serta relevan dalam mengukur capaian pembangunan manusia.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan kami mengharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data. Kritik dan saran dari pengguna data untuk publikasi selanjutnya sangat kami harapkan.

Salatiga, Februari 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Salatiga



SATRIONO

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Konsep Pembangunan Manusia.....	4
1.3 Pengukuran Pembangunan Manusia	7
1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	8
II. METODE PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA.....	9
2.1 Perkembangan Metodologi IPM	9
2.2 Alasan Perubahan Metodologi IPM	10
2.3 Keunggulan IPM Metode Baru	12
2.4 Penghitungan IPM Metode Baru.....	13
III. TREND INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SALATIGA.....	20
3.1. Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga.....	21
3.2. Capaian Pembangunan Manusia Kota Salatiga Dalam Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah	25
IV. DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT	27
V. DIMENSI PENGETAHUAN	30

VI. DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK.....	35
LAMPIRAN.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	45

<https://salatigakota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga, 2010-2021	23
Lampiran 1.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2020.....	40
Lampiran 2.	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020.....	41
Lampiran 3.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020	42
Lampiran 4.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018 – 2020	43
Lampiran 5.	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2018-2020 (Ribu Rupiah/Tahun).....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. IPM Kota Salatiga dan Komponennya, 2021 ..	21
Gambar 3. 2. Trend Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga, 2011-2021.....	23
Gambar 3. 3. Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021	26
Gambar 4. 1. Usia harapan hidup Saat Lahir Kota Salatiga 2011-2021 (Tahun).....	27
Gambar 4. 2. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia 2011 – 2020.....	29
Gambar 5. 1. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga, 2011-2021 (Tahun) ...	31
Gambar 5. 2. Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021	32
Gambar 5. 3. Rata-rata Lama Sekolah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021	34
Gambar 6. 1. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Salatiga, 2011-2021 (Ribu Rupiah/Tahun)	36
Gambar 6. 2. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021	37

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah lama hidup, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 83,60. Dengan capaian IPM itu, Kota Salatiga berada pada posisi status pembangunan manusia kategori 'sangat tinggi'. Status IPM Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16 persen (tinggi) dan Indonesia sebesar 72,29 persen (tinggi).

Selain itu selama beberapa tahun terakhir, Kota Salatiga selalu berada pada peringkat pertama dengan capaian IPM tertinggi di Jawa Tengah bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19. Capaian tersebut tidak terlepas dari capaian masing-masing dimensi yang selalu di atas capaian Jawa Tengah dan Indonesia.

Pada tahun 2021, Usia Harapan Hidup Kota Salatiga sebesar 77,55 tahun. Dari dimensi pendidikan atau pengetahuan, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 10,66 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 15,42 tahun. Sementara

itu dari dimensi standar hidup layak dilihat dari pengeluaran per kapita sebesar 15.843 ribu rupiah per kapita per tahun.

Kualitas pendidikan yang baik ditambah dengan kualitas kesehatan yang baik menjadi modal besar yang dapat meningkatkan kesempatan kerja. Pada akhirnya hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi hingga dapat menurunkan angka kemiskinan.

<https://salatigakota.bps.go.id>

Indeks Pembangunan Manusia 2021

83,60

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir



77,55
Tahun

2. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan:



15.843
Ribu Per Kapita
Per Tahun

3. Rata-Rata Lama Sekolah



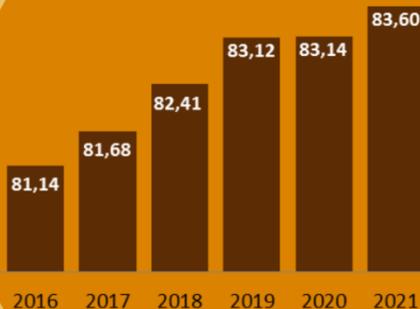
10,66
Tahun

4. Harapan Lama Sekolah



15,42
Tahun

Grafik 1. IPM Kota Salatiga Tahun 2016-2021



Grafik 2. Perbandingan IPM dengan Tingkat Provinsi dan Nasional, 2021



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Martabat manusia seharusnya menjadi tujuan hakiki pembangunan sebuah negara. Hal tersebut merupakan rekomendasi lembaga dunia *United Nations Development Programme* (UNDP) yang juga menyatakan bahwa manusia yang bermartabat adalah manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report* 1990).

Karenanya, hingga kini ukuran yang dijadikan standar keberhasilan pembangunan manusia sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Konsep pembangunan manusia itu sendiri pada dasarnya memiliki makna yang sangat luas. Konsep ini mencakup semua dimensi dasar yang dimiliki oleh manusia. Namun, ide dasar dari konsep pembangunan manusia pada intinya cukup sederhana, yaitu menciptakan pertumbuhan positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, serta perubahan dalam kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, manusia harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Sejak tahun 2015, semua pembangunan pada tataran global mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 tentang isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs dibentuk oleh tiga pilar dengan 17 tujuan (*goals*) yang harus dicapai. Di antara 17 tujuan SDGs, terdapat beberapa target yang berhubungan dengan pembangunan manusia, yaitu tujuan ketiga, tujuan keempat, dan tujuan kedelapan. Tujuan ketiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Tujuan kedelapan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (sdgsindonesia.or.id). Menurut Brata (2002), pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah. Pembangunan manusia

yang berkualitas mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan mampu meningkatkan pembangunan manusia.

Selain ketiga tujuan tersebut, pembangunan manusia juga berkaitan erat dengan tujuan SDGs pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Menurut penelitian Suliswanto (2010), IPM di Indonesia lebih berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain peningkatan kualitas SDM akan memiliki pengaruh besar dalam penurunan kemiskinan.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi hal yang penting dalam perancangan dan strategi pembangunan berkelanjutan.

1.2 Konsep Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh

berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan kekayaan berupa materiil.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan cara pandang manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model 'pertumbuhan ekonomi' lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. 'Pembangunan sumber daya manusia' cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi, sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan 'kesejahteraan' melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan 'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan,

kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

1.3 Pengukuran Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Pembangunan manusia tidak diukur hanya dari pendapatan semata, namun konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup yang layak.

Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan/pendidikan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.

Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

1.4 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penghitungan IPM di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

II. METODE PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2.1 Perkembangan Metodologi IPM

UNDP memperkenalkan IPM sejak tahun 1990. Dalam perjalanannya, UNDP telah beberapa kali melakukan revisi metode penghitungan IPM hingga tahun 2010 UNDP melakukan revisi yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai era baru pembangunan manusia. Dalam metode baru ini dikenalkan indikator harapan lama sekolah yang menggantikan indikator melek huruf dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Indonesia mulai menghitung IPM secara berkala setiap tiga tahun sejak 1996. Untuk memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan dalam menghitung Dana Alokasi Umum (DAU), mulai tahun 2004, IPM dihitung setiap tahun. Sejak tahun 2014, indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM di Indonesia sudah mengacu pada metode baru yang diterapkan oleh UNDP dengan beberapa penyesuaian.

Indikator pengeluaran per kapita digunakan sebagai proksi pendapatan yang menggantikan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang belum tersedia secara tahunan hingga tingkat kabupaten/kota. Angka *backcasting* dengan menggunakan metode baru tersedia mulai tahun 2010.

Sementara itu, metode penghitungannya yang menggunakan metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

2.2 Alasan Perubahan Metodologi IPM

Beberapa upaya perubahan metode menghitung IPM pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi logis adanya penyesuaian kondisi sosial dan perekonomian dunia. Tidak hanya itu, beberapa kali perubahan formula dalam mendapatkan angka IPM juga terkait erat dengan perkembangan riset dan teknologi dalam menganalisis kualitas pembangunan manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemerataan pendapatan masyarakat.

Bila diuraikan setidaknya terdapat tiga poin penting yang melandasi perubahan metodologi penghitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP dan mendasari penghitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan bila digunakan kembali sebagai ukuran pendidikan yang secara utuh sebab sudah tidak tepat lagi dalam menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak lagi mampu menggambarkan pendapatan masyarakat antar daerah atau antar wilayah. Hal ini dikarenakan PDB tidak hanya memperlihatkan siklus perekonomian yang hanya dilakukan oleh masyarakat secara mikro, tetapi juga menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih besar disumbang oleh sektor lain, misalnya investasi yang notabene memiliki siklus yang hanya menyentuh kondisi perekonomian beberapa masyarakat saja.
3. Penghitungan IPM metode baru menggunakan rata-rata geometrik sebab penggunaan rata-rata

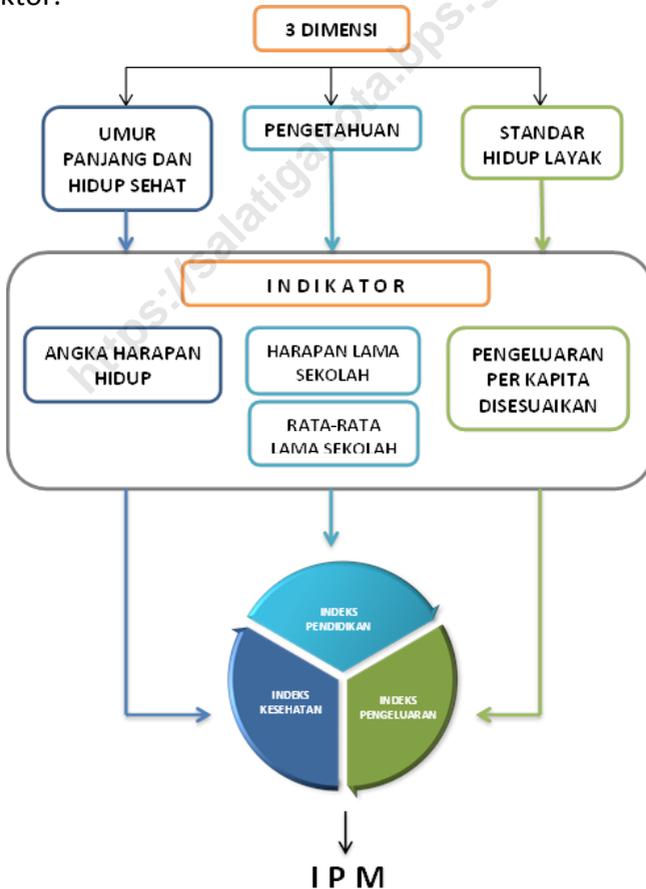
aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.3 Keunggulan IPM Metode Baru

- a. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - Produk Nasional Bruto (PNB) menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
- b. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.4 Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dimensi pengetahuan/pendidikan, dan dimensi pengeluaran (standar hidup layak). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor.



2.4.1 Penghitungan Komponen IPM

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

a. Dimensi Kesehatan (Umur Panjang dan Hidup Sehat)

Dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat) diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Usia harapan hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan *input* data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia serta negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun.

Kemudian, Indeks Kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

b. Dimensi Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke

atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c. Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

P_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

P_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

2.4.2 Menghitung IPM

Selanjutnya nilai IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

2.4.3 Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

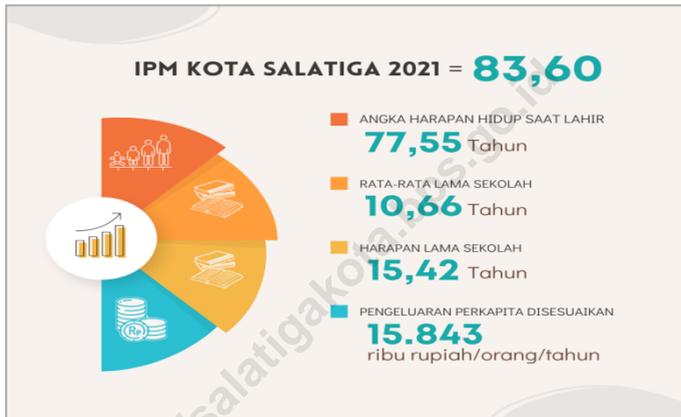
III. TREND INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SALATIGA

Pembangunan manusia merupakan isu yang strategis sehingga capaiannya perlu dipantau. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan manusia yang telah dilaksanakan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. IPM telah disepakati oleh dunia yang dijadikan alat ukur pembangunan manusia.

BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan karena masalah ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

3.1. Gambaran Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga

Gambar 3. 1.
IPM Kota Salatiga dan Komponennya, 2021



BPS mencatat IPM Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 83,60. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator usia harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan data pada tahun 2021, usia harapan hidup saat lahir di Kota Salatiga sudah mencapai 77,55 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 77,55 tahun.

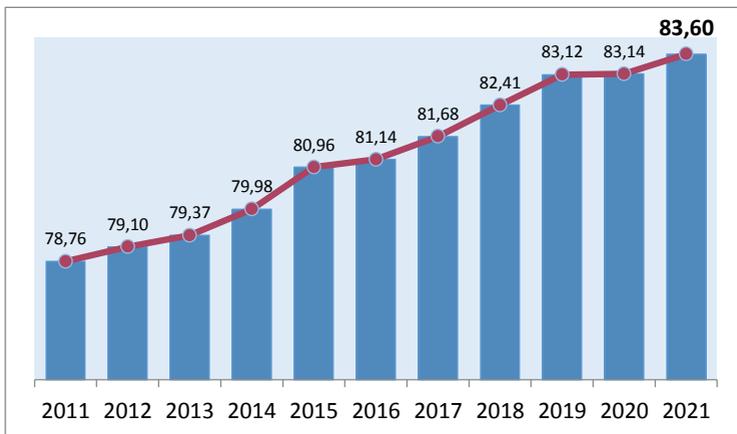
Dari sisi pendidikan, penduduk Kota Salatiga yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 10,66 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas X. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 15,42 tahun atau setara dengan Diploma III. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp 15.843.000 per kapita per tahun.

Sejak tahun 2011, pembangunan manusia di Kota Salatiga memperlihatkan perkembangan yang positif. Setiap tahun, IPM Kota Salatiga meningkat rata-rata 0,48 poin per tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, telah terjadi kenaikan IPM hingga 4,84 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Salatiga. Meskipun terimbas wabah Covid-19, pada tahun 2020 hingga 2021, IPM di Kota Salatiga masih mampu tumbuh 0,46 poin dibanding tahun 2020, dari 83,14 pada tahun 2020 menjadi 83,60 pada tahun 2021. Hal ini berarti IPM di Kota Salatiga tumbuh 0,55 persen pada periode 2020-2021.

Tabel 3. 1.
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga, 2011-2021

Tahun	Pertumbuhan (poin)
(1)	(2)
2011-2012	0,34
2012-2013	0,27
2013-2014	0,61
2014-2015	0,98
2015-2016	0,18
2016-2017	0,54
2017-2018	0,73
2018-2019	0,71
2019-2020	0,02
2020-2021	0,46

Gambar 3. 2.
Trend Indeks Pembangunan Manusia Kota Salatiga, 2011-2021



Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia juga menjadi salah satu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 jenjang dengan kriteria sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

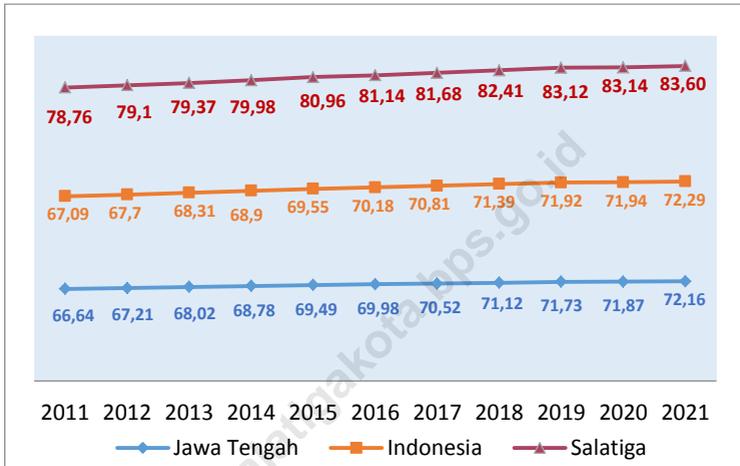
Membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Salatiga selain ditandai dengan peningkatan level IPM-nya, terlihat juga dari status pembangunan manusia di Kota Salatiga. Sejak tahun 2015, Kota Salatiga sudah memasuki pembangunan manusia dengan status sangat tinggi. Begitu pula dengan kondisi saat ini, capaian pembangunan manusia yang sudah mencapai 83,60 menunjukkan bahwa Kota Salatiga sudah berstatus sangat tinggi.

3.2. Capaian Pembangunan Manusia Kota Salatiga dalam Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah

IPM Kota Salatiga tahun 2021 menempati peringkat pertama di Provinsi Jawa Tengah. Adapun posisi kedua ditempati oleh Kota Semarang dengan IPM sebesar 83,55 dan posisi ketiga ditempati Kota Surakarta dengan IPM 82,62. Sedangkan posisi terakhir ditempati oleh Kabupaten Brebes dengan IPM 66,32. Secara lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021.

IPM Kota Salatiga selama ini berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa pembangunan manusia level Kota Salatiga lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya di tahun 2021 dibandingkan tahun 2011, laju pertumbuhan IPM Kota Salatiga lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia. Hal ini berarti bahwa jika Kota Salatiga tidak melakukan berbagai macam pembangunan maka pada tahun tertentu bisa saja IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia akan lebih tinggi.

Gambar 3. 3.
Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan
Indonesia, 2011-2021

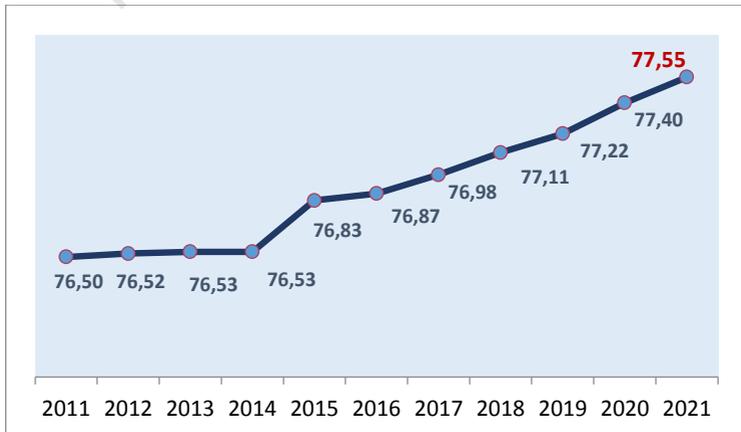


Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2011-2021 nilai IPM Kota Salatiga di atas IPM Provinsi maupun Nasional. IPM merupakan indeks komposit yang terdiri dari beberapa indikator sehingga bila IPM Kota Salatiga di atas rata-rata provinsi dan nasional berarti Kota Salatiga lebih maju dalam hal pembangunan manusia.

IV. DIMENSI UMUR PANJANG DAN HIDUP SEHAT

Indikator usia harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Usia harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan usia harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

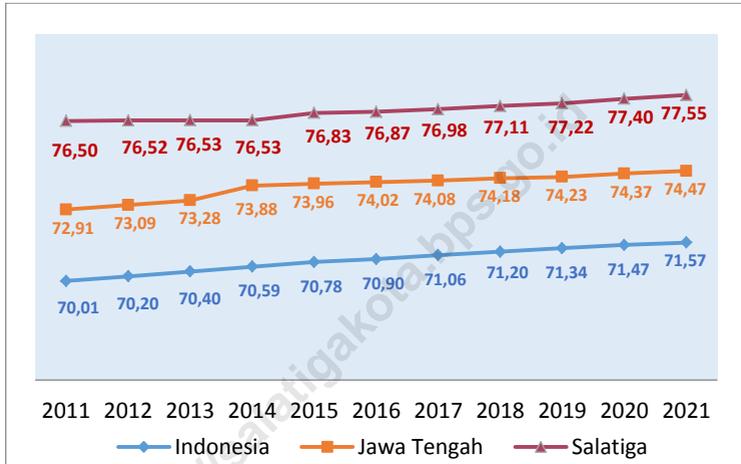
Gambar 4. 1.
Usia harapan hidup Saat Lahir Kota Salatiga
2011-2021 (Tahun)



Usia harapan hidup (UHH) saat lahir Kota Salatiga terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 hingga 2021. Hal ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin panjang. Secara tidak langsung, hal ini merupakan cerminan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat di Kota Salatiga. Banyak hal yang dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

UHH Kota Salatiga pada tahun 2021 sebesar 77,55 tahun. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 77,40 tahun. Di Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Salatiga berada di posisi tiga besar, sedikit di atas Kota Semarang yang memiliki UHH sebesar 77,51. Dua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan UHH tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo, sebesar 77,73 tahun, diikuti Kabupaten Karanganyar dan Kota Salatiga sebesar 77,55 tahun. Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021 selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.

Gambar 4. 2.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga, Provinsi
Jawa Tengah dan Indonesia
2011 – 2020



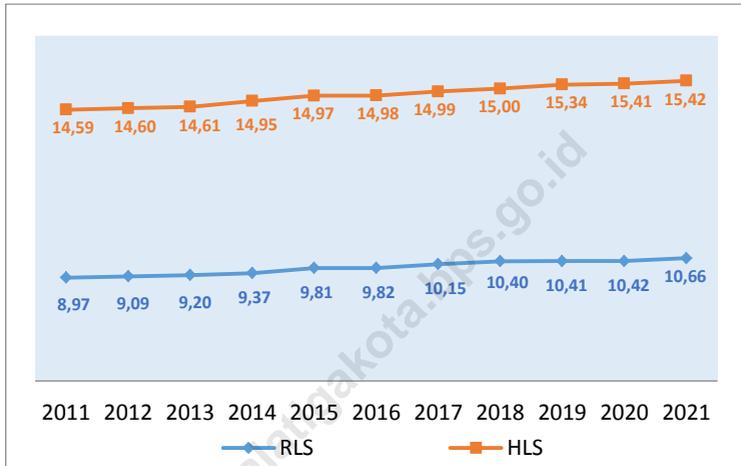
Jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional, UHH Kota Salatiga selama periode 2011-2021 selalu berada di atas UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di Salatiga masih unggul dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah atau wilayah lain di Indonesia.

V. DIMENSI PENGETAHUAN

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini diintegrasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan IPM.

Selama periode 2011 hingga 2021, pengetahuan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan peningkatan. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Gambar 5. 1.
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kota Salatiga, 2011-2021 (Tahun)



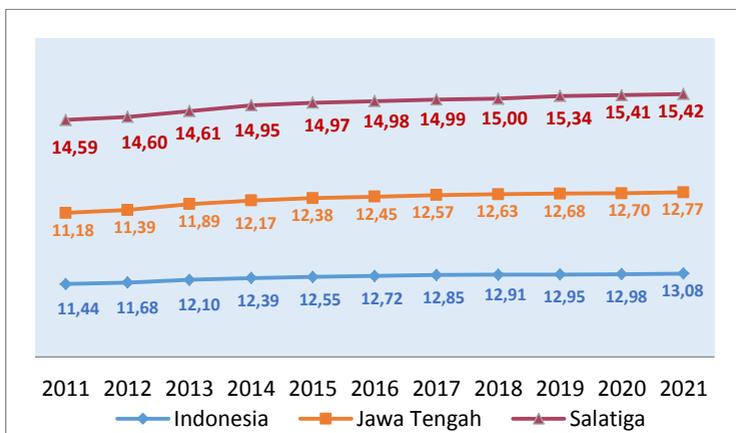
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Salatiga menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2011 hingga 2021. Secara rata-rata, harapan lama sekolah usia 7 tahun tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun selama tahun 2011-2021. Sementara itu, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 1,88 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Adapun angka harapan lama sekolah Kota Salatiga dibandingkan dengan wilayah lain selama tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021.

Pada tahun 2021 harapan lama sekolah anak yang berusia 7 tahun di Kota Salatiga sebesar 15,42 tahun atau setingkat pendidikan perguruan tinggi Diploma 3 (D-3). Nilai tersebut menempatkan Kota Salatiga di posisi ke-2 di bawah Kota Semarang yang mencapai 15,53 tahun dan di atas Kota Surakarta yang mencapai 14,88 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2020 maka harapan lama sekolah anak-anak di Kota Salatiga mengalami kenaikan sebesar 0,01 tahun.

Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga tahun 2021 berada di atas rata-rata Harapan Lama Sekolah Nasional yang hanya sebesar 13,08 tahun dan di atas rata-rata Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang hanya sebesar 12,77 tahun.

Gambar 5. 2.
Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021



Tingkat harapan lama sekolah anak-anak di Kota Salatiga yang semakin tinggi menunjukkan harapan kualitas pendidikan di Kota Salatiga yang semakin meningkat di masa yang akan datang.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Salatiga dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dapat dilihat pada Lampiran 4. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 10,66 tahun atau naik 0,24 tahun dibandingkan tahun 2020.

Pada level provinsi, Rata-rata Lama Sekolah Kota Salatiga menempati urutan ke-3 di bawah Kota Surakarta yang mencapai 10,90 tahun dan Kota Semarang yang mencapai 10,78 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Kota Salatiga sudah di atas Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,75 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah Nasional yang sebesar 8,54 tahun, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. 3 berikut.

Gambar 5. 3.
Rata-rata Lama Sekolah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021



Semakin tingginya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Salatiga merupakan modal besar bagi pembangunan Kota Salatiga di segala sektor diantaranya di sektor ekonomi. Menurut penelitian Fahrizal, Zamzani dan Safri (2021), pendidikan berpengaruh pada peningkatan kesempatan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

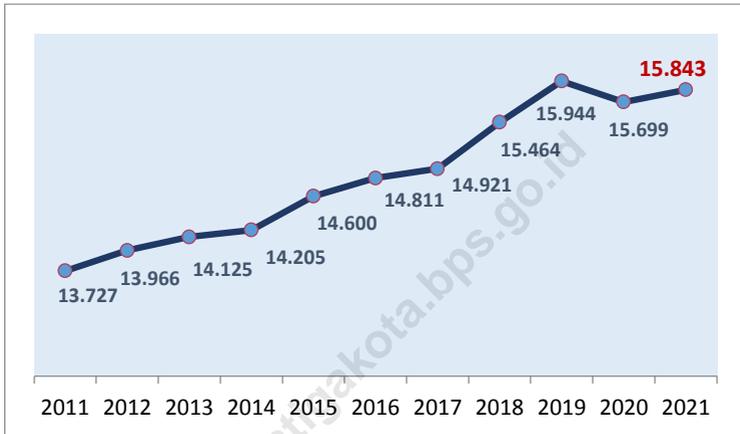
Selain menjadi modal besar bagi pembangunan, tingginya tingkat pendidikan berpotensi meningkatkan kesejahteraan atau menekan kemiskinan. Menurut penelitian Berliani (2021) pada tahun 2015-2020, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin rendah.

VI. DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

Penghitungan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan tidak hanya menghitung pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, melainkan juga penghitungan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Indikator terakhir dalam pengukuran pembangunan manusia adalah standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Salatiga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama 2011 hingga 2021, pengeluaran per kapita Kota Salatiga meningkat sebesar Rp 2.116.000,00 atau tumbuh 1,54 persen per tahun. Jika pada tahun 2011 pengeluaran per kapita penduduk hanya sekitar 13,73 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2021 sudah mencapai 15,84 juta rupiah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Salatiga semakin membaik.

Gambar 6. 1.
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Salatiga,
2011-2021 (Ribu Rupiah/Tahun)

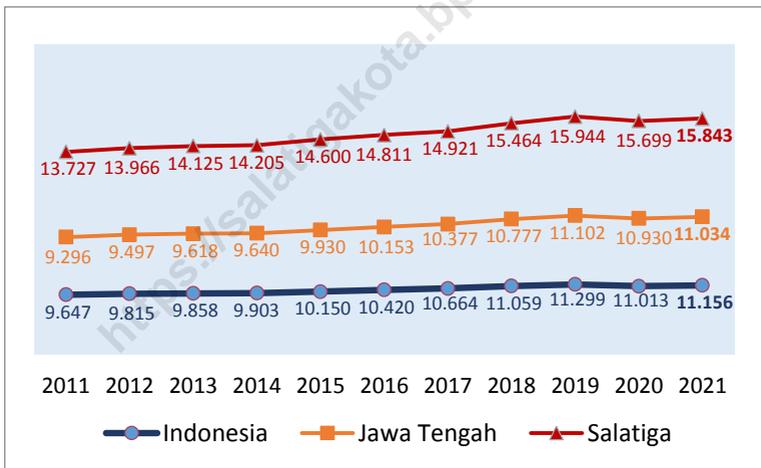


Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar Rp. 15.699.000 atau mengalami penurunan sebesar 245 ribu rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Seluruh pengeluaran perkapita di Jawa Tengah mengalami penurunan akibat dampak COVID-19. Pada tahun 2021, meskipun pandemi COVID-19 belum reda, akan tetapi pengeluaran per kapita masyarakat sudah meningkat. Pengeluaran per kapita masyarakat pada tahun 2021 sebesar Rp. 15.843.000 atau mengalami peningkatan 144 ribu rupiah.

Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga menjadi yang tertinggi pada tahun 2021, dan diikuti Kota

Semarang dan Kota Surakarta. Besarnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat di Lampiran 5. Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021 (Ribu Rupiah /Tahun).

Gambar 6. 2.
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Salatiga,
Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2011-2021



Dilihat dari perkembangan besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Salatiga dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, maka terlihat Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kota Salatiga selalu lebih tinggi. Pengeluaran per kapita yang lebih tinggi menunjukkan pendapatan yang juga lebih

tinggi. Pendapatan masyarakat Kota Salatiga yang lebih tinggi tidak terlepas dari berdirinya beberapa industri besar. Industri besar adalah industri yang memiliki jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih. Menurut BPS (2021, hal.10) industri besar yang ada di Kota Salatiga sebanyak 32 industri. Industri tersebut menyerap ribuan tenaga kerja dan tentu saja memberikan dampak domino terhadap perekonomian di wilayah sekitarnya. Selain itu industri besar cenderung memberikan hak yang layak terhadap karyawan dan memberikan upah sesuai ketentuan.

LAMPIRAN

<https://salatiga.kota.bps.go.id>

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2021

Wilayah Jawa Tengah	Indeks Pembangunan Manusia-IPM (metode baru)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	71,73	71,87	72,16
Kabupaten Cilacap	69,98	69,95	70,42
Kabupaten Banyumas	71,96	71,98	72,44
Kabupaten Purbalingga	68,99	68,97	69,15
Kabupaten Banjarnegara	67,34	67,45	67,86
Kabupaten Kebumen	69,60	69,81	70,05
Kabupaten Purworejo	72,50	72,68	72,98
Kabupaten Wonosobo	68,27	68,22	68,43
Kabupaten Magelang	69,87	69,87	70,12
Kabupaten Boyolali	73,80	74,25	74,40
Kabupaten Klaten	75,29	75,56	76,12
Kabupaten Sukoharjo	76,84	76,98	77,13
Kabupaten Wonogiri	69,98	70,25	70,49
Kabupaten Karanganyar	75,89	75,86	75,99
Kabupaten Sragen	73,43	73,95	74,08
Kabupaten Grobogan	69,86	69,87	70,41
Kabupaten Blora	68,65	68,84	69,37
Kabupaten Rembang	70,15	70,02	70,43
Kabupaten Pati	71,35	71,77	72,28
Kabupaten Kudus	74,94	75,00	75,16
Kabupaten Jepara	71,88	71,99	72,36
Kabupaten Demak	71,87	72,22	72,57
Kabupaten Semarang	74,14	74,10	74,24
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88
Kabupaten Kendal	71,97	72,29	72,50
Kabupaten Batang	68,42	68,65	68,92
Kabupaten Pekalongan	69,71	69,63	70,11
Kabupaten Pemasang	66,32	66,32	66,56
Kabupaten Tegal	68,24	68,39	68,79
Kabupaten Brebes	66,12	66,11	66,32
Kota Magelang	78,80	78,99	79,43
Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62
Kota Salatiga	83,12	83,14	83,60
Kota Semarang	83,19	83,05	83,55
Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,40
Kota Tegal	74,93	75,07	75,52

Lampiran 2. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021

Wilayah Jawa Tengah	Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir (tahun)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	74,23	74,37	74,47
Kabupaten Cilacap	73,52	73,73	73,90
Kabupaten Banyumas	73,55	73,72	73,80
Kabupaten Purbalingga	73,02	73,14	73,21
Kabupaten Banjarnegara	74,01	74,18	74,28
Kabupaten Kebumen	73,22	73,40	73,55
Kabupaten Purworejo	74,52	74,72	74,87
Kabupaten Wonosobo	71,60	71,82	71,94
Kabupaten Magelang	73,56	73,72	73,88
Kabupaten Boyolali	75,83	75,95	76,03
Kabupaten Klaten	76,68	76,78	76,86
Kabupaten Sukoharjo	77,55	77,65	77,73
Kabupaten Wonogiri	76,07	76,16	76,28
Kabupaten Karanganyar	77,38	77,47	77,55
Kabupaten Sragen	75,62	75,71	75,79
Kabupaten Grobogan	74,61	74,75	74,84
Kabupaten Blora	74,23	74,41	74,51
Kabupaten Rembang	74,43	74,55	74,61
Kabupaten Pati	76,04	76,22	76,27
Kabupaten Kudus	76,50	76,60	76,68
Kabupaten Jepara	75,74	75,84	75,91
Kabupaten Demak	75,31	75,40	75,46
Kabupaten Semarang	75,63	75,73	75,79
Kabupaten Temanggung	75,48	75,58	75,64
Kabupaten Kendal	74,33	74,43	74,48
Kabupaten Batang	74,59	74,69	74,74
Kabupaten Pekalongan	73,57	73,69	73,74
Kabupaten Pemalang	73,22	73,40	73,53
Kabupaten Tegal	71,40	71,60	71,72
Kabupaten Brebes	69,04	69,33	69,54
Kota Magelang	76,75	76,85	76,93
Kota Surakarta	77,12	77,22	77,32
Kota Salatiga	77,22	77,40	77,55
Kota Semarang	77,25	77,34	77,51
Kota Pekalongan	74,28	74,38	74,44
Kota Tegal	74,34	74,46	74,54

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2021

Wilayah Jawa Tengah	Harapan Lama Sekolah-HLS (tahun)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	12,68	12,70	12,77
Kabupaten Cilacap	12,49	12,50	12,63
Kabupaten Banyumas	12,82	12,85	13,03
Kabupaten Purbalingga	11,98	11,99	12,00
Kabupaten Banjarnegara	11,45	11,46	11,63
Kabupaten Kebumen	13,04	13,34	13,35
Kabupaten Purworejo	13,49	13,50	13,51
Kabupaten Wonosobo	11,74	11,75	11,76
Kabupaten Magelang	12,53	12,54	12,55
Kabupaten Boyolali	12,43	12,56	12,57
Kabupaten Klaten	13,24	13,25	13,39
Kabupaten Sukoharjo	13,82	13,83	13,84
Kabupaten Wonogiri	12,48	12,49	12,50
Kabupaten Karanganyar	13,67	13,68	13,69
Kabupaten Sragen	12,69	12,83	12,84
Kabupaten Grobogan	12,29	12,30	12,44
Kabupaten Blora	12,19	12,20	12,35
Kabupaten Rembang	12,10	12,11	12,12
Kabupaten Pati	12,41	12,65	12,94
Kabupaten Kudus	13,22	13,23	13,24
Kabupaten Jepara	12,74	12,75	12,76
Kabupaten Demak	13,01	13,31	13,32
Kabupaten Semarang	12,94	12,97	12,98
Kabupaten Temanggung	12,13	12,14	12,32
Kabupaten Kendal	12,80	12,95	12,96
Kabupaten Batang	12,00	12,01	12,13
Kabupaten Pekalongan	12,40	12,41	12,42
Kabupaten Pemaslang	11,94	11,95	11,96
Kabupaten Tegal	12,58	12,67	12,89
Kabupaten Brebes	12,03	12,04	12,05
Kota Magelang	13,81	14,14	14,15
Kota Surakarta	14,55	14,87	14,88
Kota Salatiga	15,34	15,41	15,42
Kota Semarang	15,51	15,52	15,53
Kota Pekalongan	12,83	12,84	12,85
Kota Tegal	13,04	13,05	13,07

Lampiran 4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2021

Wilayah Jawa Tengah	Rata-rata Lama Sekolah-RLS (tahun)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	7,53	7,69	7,75
Kabupaten Cilacap	6,93	6,97	7,09
Kabupaten Banyumas	7,42	7,52	7,63
Kabupaten Purbalingga	7,14	7,24	7,25
Kabupaten Banjarnegara	6,50	6,74	6,75
Kabupaten Kebumen	7,53	7,54	7,55
Kabupaten Purworejo	7,91	8,12	8,21
Kabupaten Wonosobo	6,76	6,81	6,82
Kabupaten Magelang	7,77	7,78	7,79
Kabupaten Boyolali	7,56	7,84	7,85
Kabupaten Klaten	8,31	8,58	8,81
Kabupaten Sukoharjo	9,10	9,34	9,35
Kabupaten Wonogiri	7,04	7,33	7,34
Kabupaten Karanganyar	8,52	8,56	8,57
Kabupaten Sragen	7,34	7,65	7,66
Kabupaten Grobogan	6,86	6,91	7,11
Kabupaten Blora	6,58	6,83	6,99
Kabupaten Rembang	7,15	7,16	7,30
Kabupaten Pati	7,19	7,44	7,48
Kabupaten Kudus	8,63	8,75	8,76
Kabupaten Jepara	7,44	7,68	7,79
Kabupaten Demak	7,55	7,71	7,86
Kabupaten Semarang	8,01	8,02	8,03
Kabupaten Temanggung	7,15	7,24	7,25
Kabupaten Kendal	7,25	7,45	7,46
Kabupaten Batang	6,63	6,87	6,88
Kabupaten Pekalongan	6,88	6,91	7,17
Kabupaten Pemalang	6,41	6,42	6,45
Kabupaten Tegal	6,86	6,98	6,99
Kabupaten Brebes	6,20	6,21	6,22
Kota Magelang	10,33	10,39	10,62
Kota Surakarta	10,54	10,69	10,90
Kota Salatiga	10,41	10,42	10,66
Kota Semarang	10,52	10,53	10,78
Kota Pekalongan	8,71	8,96	9,18
Kota Tegal	8,31	8,51	8,73

**Lampiran 5. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2019-2021 (Ribu
Rupiah/Tahun)**

Wilayah Jawa Tengah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)		
	2019	2020	2021
PROVINSI JAWA TENGAH	11.102	10.930	11.034
Kabupaten Cilacap	10.639	10.440	10.534
Kabupaten Banyumas	11.703	11.448	11.546
Kabupaten Purbalingga	10.131	9.914	10.032
Kabupaten Banjarnegara	9.547	9.263	9.407
Kabupaten Kebumen	9.066	8.901	9.028
Kabupaten Purworejo	10.342	10.163	10.275
Kabupaten Wonosobo	10.871	10.621	10.760
Kabupaten Magelang	9.387	9.301	9.440
Kabupaten Boyolali	13.079	12.910	13.031
Kabupaten Klaten	12.074	11.921	12.017
Kabupaten Sukoharjo	11.557	11.325	11.428
Kabupaten Wonogiri	9.426	9.286	9.429
Kabupaten Karanganyar	11.569	11.428	11.509
Kabupaten Sragen	12.720	12.589	12.679
Kabupaten Grobogan	10.350	10.221	10.294
Kabupaten Blora	9.795	9.571	9.669
Kabupaten Rembang	10.551	10.328	10.519
Kabupaten Pati	10.660	10.390	10.506
Kabupaten Kudus	11.318	11.160	11.272
Kabupaten Jepara	10.609	10.343	10.536
Kabupaten Demak	10.344	10.128	10.248
Kabupaten Semarang	12.116	11.966	12.070
Kabupaten Temanggung	9.489	9.343	9.408
Kabupaten Kendal	11.597	11.425	11.608
Kabupaten Batang	9.573	9.431	9.524
Kabupaten Pekalongan	10.508	10.312	10.409
Kabupaten Pemalang	8.546	8.461	8.573
Kabupaten Tegal	9.798	9.612	9.700
Kabupaten Brebes	10.238	10.058	10.152
Kota Magelang	12.514	12.210	12.349
Kota Surakarta	15.049	14.761	14.911
Kota Salatiga	15.944	15.699	15.843
Kota Semarang	15.550	15.243	15.425
Kota Pekalongan	12.680	12.467	12.598
Kota Tegal	13.250	12.999	13.143

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

_____. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia 2021*.
<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>.
Diakses pada tanggal 17 Januari 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. 2021. *Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga 2021*. Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Badan Pusat Statistik Kota Salatiga. 2021. *Direktori Industri Manufaktur Besar Sedang Kota Salatiga 2020*. Kota Salatiga: Badan Pusat Statistik Kota Salatiga.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Analisis Kualitas Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah 2020*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2022. *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-.html>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2022.
- Berliani, Kartika. 2021. *Pengaruh tingkat pengangguran, tingkat pendidikan dan laju pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020*. Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398. Vol. 6, No. 2, Februari 2021.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2002. *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) Kajian Ekonomi Negara Berkembang Vol. 7, No.2, hal. 113-122.
- Fahrizal, Zamzani, dan Muhammad Safri. 2021. *Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.1, Januari-Maret

2021. ISSN: 2085-1960 (print); 2684-7868 (online).
Diakses dari
<https://repository.unja.ac.id/18073/1/Jurnal%20021%20T%20Pendidikan.pdf> pada 11 Februari 2022.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga. 2018. *RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022*. Salatiga: Pemerintah Daerah Kota Salatiga

Sdgsindonesia. 2022. <http://sdgsindonesia.or.id/>.
Diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. 2010. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka kemiskinan di Indonesia*. Malang: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 8 No. 2 Desember 2010.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SALATIGA**

Jl. Hasanudin Km.01, Kel. Dukuh, Sidomukti

Telp : (0298) 326319

Email : bps3373@bps.go.id

Website : salatiga.bps.go.id